

ABSTRACT

COLLABORATION OF MANAGEMENT OF VAMAGES AND BEGGERS IN THE SOCIAL SERVICES OF LAHAT REGENCY, SOUTH SUMATRA PROVINCE

By : Nyoman Augusto Mardika

The number of homeless and beggars on the streets of Lahat Regency are not entirely residents of Lahat Regency, but many are residents from outside the region. From these problems, it shows that the government is not ready to face the root of the problem. Public order has not gone well in Lahat Regency. Regional Regulation Number 1 of 2010 concerning Order, Cleanliness and Beauty has not been effectively implemented. The purpose of this study: to identify and analyze the collaboration between homeless people and beggars, to explain the inhibiting factors and to describe the efforts made by the Social Service and the Civil Service Police Unit. Handling Homeless and Beggars in Lahat Regency. The research method used is descriptive qualitative, data collection is done through interviews, observations, non-participants and documentation. Based on the results of the research, the handling of homeless and beggars was carried out in a direct persuasive manner through control by the Civil Service Police Unit, then submitted to the Social Service for guidance and rehabilitation activities, and repatriation by the relevant Social Service. The author suggests that a regional regulation / regional regulation be made which regulates the prohibition of providing assistance or compensation to homeless people and beggars in Lahat Regency.

Keywords: Homeless and Beggars, Social Service and Civil Service Police Unit.



ABSTRAK

KOLABORASI PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh : Nyoman Augusto Mardika

Banyaknya gelandangan dan pengemis di jalanan Kabupaten Lahat bukan sepenuhnya penduduk dari Kabupaten Lahat, melainkan banyak juga yang merupakan penduduk dari luar wilayah. Dari permasalahan tersebut menunjukkan kurang siapnya pemerintah dalam menghadapi akar permasalahan. Ketertiban masyarakat belum berjalan dengan baik di Kabupaten Lahat. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan belum efektif dilaksanakan. Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui dan menganalisis Kolaborasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, menjelaskan faktor penghambat serta mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Lahat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, non partisipan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dilakukan secara persuasif langsung melalui penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi, serta dilakukan pemulangan oleh Dinas Sosial terkait. Penulis menyarankan dibuat Perda/Perkada yang mengatur mengenai pelarangan pemberian bantuan atau santunan kepada Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kabupaten Lahat.

Kata Kunci: Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat ekonomi masyarakat di Indonesia masih di dalam tahap perkembangan, hal ini dipengaruhi juga dengan adanya pandemi COVID 19 di seluruh dunia. Setiap negara mengalami dampak di seluruh penjuru kehidupan utamanya di sektor ekonomi. Pengaruh dari perkembangan ekonomi ditandai dengan munculnya perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sarana prasarana. Adanya pertumbuhan dan perkembangan penduduk juga mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan sosial. Pertumbuhan ekonomi belum menjamin berkurangnya kemiskinan, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Kurangnya perhatian dari pemerintah juga merupakan suatu faktor yang memperburuk keadaan ekonomi dalam masa pandemic ini.

Kolaborasi sangat penting dalam pelaksanaan aktivitas untuk dapat memuat perencanaan berdasarkan tujuan yang akan dicapai seperti tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Tingkat keberhasilan dari aktivitas yang dilakukan akan menunjukkan seberapa baik suatu strategi yang dilakukan terhadap kolaborasi yang digunakan. Pada Dinas Sosial tergantung pada regulasi yang mengatur dari perencanaan hingga pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis, dengan demikian konsep kolaborasi tetap harus dipahami oleh penyelenggara pemerintahan dan instansi terkait agar dalam pelaksanaannya bisa mengatur bagaimana arah perencanaan dan jalannya rencana tersebut.

Penanggulangan adalah tindakan yang berfungsi dalam rangka mengurangi atau mengatasi suatu permasalahan. Penanggulangan yang diangkat dalam

penelitian ini berfokus pada penanggulangan gelandangan dan pengemis yang ada di masyarakat.

Gelandangan adalah seseorang yang kehidupannya kurang beruntung secara ekonomi dan berusaha untuk berjuang mempertahankan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Gelandangan adalah seseorang dengan menjalani hidup dengan nasib tidak sesuai kehidupan yang layak di masyarakat.¹ Sedangkan pengemis` adalah seseorang yang mencari nafkah dengan mengemis di depan umum dengan berbagai cara dengan harapan mengharapkan simpati dari orang`lain. Kemudian Gelandangan juga merupakan seseorang yang mengalami kemiskinan dan berkehidupan di kota besar yang tidak memiliki tempat tinggal yang jelas secara sah.

Hasil rekapitulasi yang dilakukan Dinas Sosial terhadap jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Lahat, sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Rekapitulasi PMKS/PPKS Kabupaten Lahat Tahun 2021

NO	JENIS PMKS/PPKS	JUMLAH
1	Anak Jalanan	2
2	Anak Terlantar	125
3	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	104
4	Lanjut Usia Terlantar	4.085
5	Penyandang Disabilitas	733
6	Pemulung	49
	Jumlah	5.098

Sumber: Rekapitulasi PMK/PPKS Dinas Sosial Kabupaten Lahat.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia," PN Balai Pustaka, Jakarta., 1976.

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan jumlah data gelandangan dan pengemis di Kabupaten Lahat. Dari jumlah diatas menunjukkan gelandangan dan pengemis bersumber dari masyarakat yang kurang beruntung dan adanya mental yang kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena adanya suatu tekanan keadaan maka timbullah keinginan untuk menjadi gelandangan dan pengemis sebagai profesi atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan penghasilan mereka dapat lebih tinggi dari orang yang bekerja di kantor, adanya kesenjangan sosial antar masyarakat sangat mempengaruhi jumlah gelandangan dan penegemis yang ada di tambah lagi adanya pandemil COVID 19 yang memperburuk keadaan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang sangat perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah dalam halnya mengatasi gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Lahat

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas dapat diketahui faktor apa saja yang menghambat dan mendorong pelaksanaan peraturan daerah dan mewujudkan visi dan misi Bupati Lahat, serta upaya apa saja yang akan dilakukan kedepannya oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki lokus penelitian yang sama dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan penilitan serta perbandingan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Indikator	Metode Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	2	3	4	5
1	Penertiban Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru, Riau, Muslim, 2017	Ekonomi, Gelandangan, Pengemis, Peraturan Daerah	Kualitatif	Penggunaan grand teori strategi. Kemudian pada faktor penghambatnya yaitu : kurangnya anggaran APBN
2.	Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Sosial Kota Medan, Natanael Jamson Rumapea, 2020.	Upaya penanggulangan, Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial	Kualitatif	Penggunaan grand teori Upaya. Kemudian dalam faktor penghambatnya yaitu : belum efektifnya kegiatan preventif.
3.	Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 tahun 2016 Tentang Penertiban Gelandangan dan Pengemis, Najemia, 2019.	Penertiban, Implementasi, Gelandangan dan pengemis	Kualitatif	Penggunaan grand teori Implementasi. Faktor penghambat dari penertiban adalah faktor sosial budaya masyarakat

				Medan yang keras menyebabkan susah terlaksananya penertiban dan faktor SDM yang belum mampu untuk melakukan upaya dalam penertiban gelandangan dan pengemis.
4.	Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Studi Dinas Sosial, Iza Zuhriah, 2019.	Kebijakan Pemerintah, Gelandangan dan pengemis	Kualitatif	Penggunaan grand teori Efektivitas. Kemudian faktor penghambatnya yaitu : manajemen organisasi karena kurang adanya evaluasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial
5.	Analisis Fungsi Kehumasan Dinas Sosial Dalam Implementasi Program Penanggulangan Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) Di Kota Yogyakarta, Widyanita Mustika Putri, 2017.	Fungsi Kehumasan, Dinas Sosial, Penanganan Gelandangan dan Pengemis	Kualitatif	Penggunaan grand teori Analisis. Faktor penghambatnya yaitu : adanya organisasi LSM yang pro terhadap gelandangan dan pengemis

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil jurnal dan skripsi oleh Muslim, 2017, Natanael Jamson Rumapea, 2020, Najemia, 2019, Iza Zuhriah, 2019, Widyanita Mustika Putri, 2017

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berfokus pada pelaksanaan kolaborasi antar Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan induktif, wawancara, dan literatur. Grand teori yang digunakan yaitu kolaborasi menurut Ansell dan Gash yang menyatakan bahwa kolaborasi adalah suatu kegiatan bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses kolaborasi penanggulangan gelandangan dan pengemis, mengetahui faktor penghambat dan pendorong, serta memahami apa upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Sselatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash dan menganalisis data dengan melakukan wawancara, observasi, tinjauan literatur, dan penarikan kesimpulan secara kualitatif (Sugiyono, 2013).

Penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap pejabat dinas terkait, melakukan observasi secara langsung di lapangan, melihat literatur yang bersangkutan dan melaukakan penarikan kesimpulan sesuai fakta yang ada di lapangan.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap hasil penelitian yang telah dikemukakan pada subbab hasil penelitian. Pembahasan berisikan penjabaran mengenai hasil penelitian dengan

menggunakan sampel data penelitian secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah yang lebih dulu dipaparkan pada bagian pendahuluan.

3.1 Kolaborasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat

Kolaborasi adalah kegiatan bekerjasama antar suatu individu atau kelompok dalam rangka mencapai suatu keputusan dan kepentingan bersama. Dengan adanya suatu kerjasama suatu tujuan atau permasalahan akan mudah diselesaikan yang didukung juga oleh sinergitas yang baik dan koordinasi yang baik.

3.1.1 Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Sebelum Dilakukan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Adanya kehadiran Gelandangan dan Pengemis di lingkungan Kabupaten Lahat membuat pemerintah Kabupaten Lahat bersiap untuk membenahi diri dengan cara melakukan penanggulangan melalui Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja.

3.1.2 Struktur Kelembagaan

Struktur Kelembagaan merupakan suatu hal yang penting untuk memahami suatu hirarki yang ada dalam suatu dinas, serta memahami fungsi dan tugas masing-masing jabatan structural yang ada dalam suatu dinas.

3.1.3 Kapasitas SDM dan Institusi

Kapasitas adalah suatu kemampuan kinerja dari SDM yang dimiliki oleh individu, kelompok dalam rangka menyelesaikan setiap pekerjaan yang merupakan suatu beban atau tugas yang merupakan tanggung jawabnya.

3.1.4 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan prosedur yang dijadikan acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan suatu kegiatan, sehingga suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terukur sesuai dengan ruang lingkup kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

3.1.5 Perencanaan Strategi

Strategi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah kegiatan, tentunya tanpa strategi yang jelas dan konkrit suatu hal dilakukan secara kurang terukur dan tepat, maka dari itu suatu strategi sangatlah penting untuk mendukung suatu kegiatan.

3.1.6 Integritas

Integritas merupakan suatu tolak ukur bagi suatu kinerja yang dilakukan dengan melihat bahwa suatu tindakan baik itu dari pimpinan dan anggota Organisasi Perangkat Daerah itu telah baik atau tidak baik.

3.1.7 Kemampuan Berinteraksi

Kemampuan berinteraksi merupakan kunci dari melakukan kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam melakukan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Lahat.

Interaksi dalam halnya kerjasama menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak keluar dari rencana dan strategi yang ada.

3.2 Faktor Penghambat Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial di Kabupaten Lahat

Banyaknya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Lahat dikarenakan masih rendahnya mental masyarakat, menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai pekerjaan utama, eksploitasi anak, dan lain sebagainya, banyaknya gelandangan dan pengemis juga dikarenakan adanya kegiatan jumat berkah yang dimanfaatkan beberapa orang untuk mendapatkan makanan gratis di sekitar jalan raya Kabupaten Lahat.

Faktor penghambat penanggulangan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Lahat muncul seiring dengan adanya penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lahat maupun permasalahan sosial yang sudah sejak lama ada. Permasalahan penanggulangan gelandangan dan pengemis turut menjadi perhatian.

Menurut Bapak Evan sebagai Kepala Bagian Pemberdayaan Sosial “Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kabupaten Lahat tidak sepenuhnya merupakan orang asli Kabupaten Lahat, oleh karena itu kami lakukan pemulangan ke daerah asal mereka dan juga terdapat suatu sindikat yang memanfaatkan anak kecil untuk menjadi pengemis di jalanan, hal ini juga menjadi perhatian kami untuk diberikan pembinaan secara persuasif”,

Permasalahan yang ada belum menemui cara yang tepat dan akurat untuk menanggulangnya. Berdasarkan pengambilan data yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi dan dapat dikelompokkan sebagai penghambat penanggulangan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Lahat. Seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi dan perundang-undangan untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis, hal tersebut membuat Dinas Sosial hanya memulangkan gelandangan dan pengemis yang bukan merupakan masyarakat asli Kabupaten Lahat.

3.3 Faktor Pendukung Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Faktor-faktor pendukung dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lahat yaitu adanya suatu sinergitas antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat yang cukup efektif, sehingga penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat berjalan dengan baik.

3.4 Upaya Yang Telah Dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Lahat

Upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kabupaten Lahat telah digambarkan pada tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lahat pada bagian hasil.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan untuk Kabupaten Lahat menjadi lebih baik dengan mengatasi kesenjangan sosial dan penyakit masyarakat yang ada dalam masyarakat, sama halnya dengan penelitian Jamson Natael Rumapea yang menilite mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Medan yang menggunakan grand teori upaya.

Layaknya program penanggulangan gelandangan dan pengemis masih memiliki kekurangan tersendiri di setiap daerahnya, seperti : belum adanya fasilitas rehabilitasi, kurangnya mental dari masyarakat, belum adanya per undang-undangan yang mengatur mengenai gelandangan dan pengemis, serta adanya kesenjangan sosial di antara masyarakat.

Adanya program penanggulangan ini diharapkan dapat mengatasi pekerjaan rumah di setiap daerah untuk memperbaiki SDM, mengatasi kesenjangan sosial dan penyakit masyarakat yang menjadi persoalan sehari-hari.

IV Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yang telah dijabarkan dalam pembahasan diatas mengenai Kolaborasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kolaborasi Penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah berdasarkan rencana dan strategi dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Faktor Penghambat Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial di Kabupaten Lahat Banyaknya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Lahat dikarenakan masih rendahnya mental masyarakat,
3. Adapun faktor pendukung dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis seperti: adanya sinergitas yang baik antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat berjalan dengan baik
4. Upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Lahat Upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kabupaten Lahat telah

digambarkan pada tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lahat pada bagian hasil.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian juga hanya dilakukan pada dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswel.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa awal dari temuan penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Ekman selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Content Analysis Dan Focus Group Discussion Dalam Penelitian Sosial Di Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Creswell, John W. 2002. *Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK.
- Dr. La Ode Syaiful Islamy H., M.Si. 2020. *Collaborative Governance*. Jakarta: Gramedia.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 2004. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hadi, Sutrisno. 1982. *Metodologi Reseach, Jilid I*. Yogyakarta : YP. Fakultas Psikologi, UGM.

- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Nazir. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Nonprofit*. Jakarta: Gramedia.
- Sarlito W Sarwono. 2002. *Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- . 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulber, Silalahi. 2009. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Lukmandono. 2015. *Analisis SWOT Untuk Menentukan Keunggulan Strategi Bersaing Di Sektor Industri Kreatif Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan III*. Surabaya: Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya.
- Yunni Rusmawati DJ. 2017. *Analisis Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan*. Lamongan: Cv. Lamongan Sports Center.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.” Jakarta, RI, 2009.
- Nomor, Keputusan Presiden Republik Indonesia. “Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 1983 Tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.” NKRI
- Nomor, 1983 Nomor, Peraturan Pemerintah. “Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis,” 1980.
- Nomor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. “Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.” LN RI Nomor, 2018.
- Pemerintah Kabupaten Lahat. “Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2010,” 2011.

